



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR: 6 /SK/D.4/09/2014**

TENTANG

**PENETAPAN HONORARIUM
NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI DAN PELATIHAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2014**

**DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah dibentuknya Tim Pelaksana Narasumber Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan *Whistleblowing System* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014, dipandang perlu menetapkan Honorarium Tim Pelaksana Narasumber Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan *Whistleblowing System* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa untuk hal tersebut di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun 2014;
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: PER.001/KEP.LKPP/05/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN HONORARIUM NARASUMBER TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI DAN PELATIHAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2014.**
- PERTAMA** : Menetapkan Honorarium Narasumber kepada mereka yang namanya tercantum dalam tabel yang besarnya adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Segala biaya Honorarium yang diperlukan untuk Narasumber Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan *Whistleblowing System* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun

Anggaran 2014 DIPA Nomor: 106-01.970968/2014 tanggal 05 Desember 2013 MAK. 3937.009.012.522151 Belanja Jasa Profesi;

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan *Whistleblowing System* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2014

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

ttd

IKAK GAYUH PATRIASTOMO
NIP. 19610408 199403 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Kepala Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas, LKPP;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, LKPP;
5. Bendahara Pengeluaran Anggaran, LKPP;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LKPP
NOMOR : 6 /SK/D.4 /09/2014
TANGGAL : 1 September 2014

**BESARAN HONORARIUM
NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI DAN PELATIHAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2014**

No.	Jabatan Narasumber	Besaran Honorarium	Keterangan
1.	Eselon I/ Pakar/Praktisi	Rp 1.400.000 / Jam	
2.	Eselon II	Rp 1.000.000 / Jam	
3.	Eselon III Ke Bawah	Rp 900.000 / Jam	

Jakarta, (September 2014

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

ttd

IKAK GAYUH/PATRIASTOMO
NIP. 19610408 199403 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LKPP
NOMOR : 6 /SK/D.4/09/2014

SUSUNAN TIM
NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI DAN PELATIHAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2014

No.	Nama	Jabatan
1.	R. FENDY DHARMA SAPUTRA	: Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP

Jakarta, 1 September 2014